EDITORIAL

Bulan September ini bertepatan pula dengan Bulan Ramadhan, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan puasa. Ibadah puasa identik dengan pengendalian diri dari semua yang boleh kita lakukan, mulai dari makan, minum, hubungan dengan pasangan, sampai hubungan dengan orang lain. Di saat seperti inilah rasanya sangat tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi diri mengenai sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Sudahkah kita bertutur lembut pada orang yang membutuhkan kita? Apakah ketika mengerjakan tugas untuk orang lain, maka tugas itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya?

Sesungguhnya disadari atau tidak, sebagian besar hidup kita dihabiskan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Banyak ragam tugas pelayanan yang kita lakukan, objek layanannya pun bermacam-macam, mulai dari keluarga, orang terdekat, rekan kerja, dan atasan. Apabila ditarik ke atas maka perilaku pelayanan yang biasa kita lakukan sehari-hari merupakan cermin dari perilaku kita dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas negara kita yang dituliskan oleh founding fathers Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu perbaikan kualitasnya harus menjadi target pemerintah kita yang dijabarkan secara langsung melalui perilaku aparaturnya.

Selama ini lebih banyak keluhan yang muncul apabila kita membicarakan mengenai kualitas pelayanan publik. Apa yang terjadi? Jawaban yang muncul antara lain adalah karena masalah sistem penyelenggaraan dan pengawasan layanan publik yang belum memadai. Oleh karena itu pemerintah, melalui Meneg PAN mengeluarkan Keputusan MenPAN Nomor: 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diharapkan menjadi starting point dalam reformasi pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Surat Keputusan ini lalu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 38 dan 41 Tahun 2007 mengenai penataan kelembagaan di pemerintah daerah; peraturan mengenai pembuatan Standard Operating Procedure; penguatan lembaga Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dan frontlineryang berhubungan dengan masyarakat di desa.

Tapi peraturan tinggallah peraturan! Kunci dari kualitas pelayanan publik adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. SDM Aparatur harus mau menginternalisasi nilai-nilai pelayanan publik dalam dirinya. SDM Aparatur harus menumbuhkan naluri untuk selalu memberikan yang terbaik dari dirinya. Itulah jalan menuju pelayanan prima kepada publik. Oleh karena itu menjadi tugas bagi kita yang lebih dahulu memiliki kesadaran akan pelayanan publik untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi ini. Saatnya kita sebarkan "virus" pelayanan prima pada semua orang sambil terus memperkuat tekad dalam diri kita sendiri. Menyitir prinsip 3S dari Abdullah Gymnastiar atau yang terkenal dipanggil Aa' Gym, maka mari kita MULAI perubahan itu dari diri sendiri, MULAI dari yang kecil dan Mulai dari SEKARANG!

Sebentar lagi pemilihan presiden Amerika Serikat akan diselenggarakan, kedua kandidat -John McCain dan Barack Obama- berlomba mengajukan program-program unggulan mereka dalam memajukan negaranya. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia, apalagi tahun depan Indonesia akan menghadapi agenda yang sama. Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden menjadi topik yang hangat di kalangan akademisi, birokrat, pengusaha, dan masyarakat. Siapapun nantinya yang akan terpilih, kita harapkan akan tetap berorientasi kepada pelayanan publik. Mari kita jaga optimisme dalam diri kita. Berusaha meningkatkan kompetensi diri dan mengabdikan untuk penguasa, tetapi pada kepentingan yang lebih tinggi, yakni penghambaan pada Tuhan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tetap berpikir positif dan berusaha untuk menggulirkan perubahan ke arah yang lebih baik. AD LUCEM (*Into the Light*)!